



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu dianggap sebagai penggambaran awal yang terkait dengan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan atau referensi penulis untuk memudahkan dan melengkapi hasil temuan penulis. Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam mengerjakan penelitian dan menambah pengetahuan mengenai penelitian yang serupa.

Pertiwi (2012, p. 11) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemahaman Jurnalis mengenai Konsep Jurnalisme Bencana (Wawancara Lima Jurnalis dari Media Cetak, Media Televisi, dan Media *Online*)” bertujuan untuk mengetahui pemahaman jurnalis mengenai konsep jurnalisme bencana, dilihat dari proses saat melakukan peliputan bencana, pemahaman mengenai konsep peliputan bencana, dan di tiap fase peliputan bencana. Adhika menggunakan teori pembuktian dan teori kognitif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan paradigma postpositivisme dalam menentukan bagaimana cara pandang seseorang.

Hasil temuan Pertiwi (2012, p. 107) dalam melakukan penelitian menemukan bahwa sebagian jurnalis sudah memahami mengenai jurnalisme bencana namun tidak secara menyeluruh. Jurnalis memahami

prinsip akurasi, memberikan porsi untuk penampungan suara korban, mengangkat *human elements* dan sisi lain bencana. Namun, jurnalis belum memahami prinsip peliputan yang menekankan perspektif kemanusiaan dalam peliputan bencana.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmono dan Fajar Junaedi (2018) meneliti permasalahan mengenai pentingnya jurnalisme sensitif bencana dalam ruang redaksi media massa. Penelitian ini mengkaji kasus bencana gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 dan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan konsep jurnalisme sensitif bencana. Wawancara yang dilakukan dengan narasumber menghasilkan pengertian bahwa jurnalis yang berada di lokasi peliputan bencana dan redaktur yang berada di ruang redaksi menjadi saksi sekaligus korban bencana. Jurnalisme sensitif bencana terdiri atas pengalaman jurnalis menjadi saksi dan membentuk laboratorium jurnalisme sensitif.

Penelitian Sukmono (2018) menggunakan penelitian terdahulu dari penelitian Santi Indra Astuti pada tahun 2011 tentang erupsi Gunung Merapi di tiga stasiun, yakni TV One, Metro TV, dan SCTV. Terdapat tiga poin utama kurangnya jurnalisme bencana, yakni rendahnya mutu liputan, rendahnya kapabilitas dalam meliput bencana, terutama pada lokasi kejadian, karena gramatika yang tidak terstruktur, dan minimnya perhatian dan kesadaran media terhadap kepentingan publik. Faktor pendukung menunjukkan bahwa praktik jurnalisme bencana seharusnya menjadi tugas

suci, namun pada praktiknya masih belum ideal. Jurnalisme bencana justru menunjukkan bahwa kebencanaan dikemas sebagai komoditas pemberitaan yang dipublikasikan kepada khalayak dengan mengutamakan isu kesedihan korban. Maka, idealisme jurnalisme sensitif bencana justru tidak dijalankan dalam praktik jurnalisme di Indonesia.

Hasil yang ditemukan dari penelitian Sukmono (2018) ini, menunjukkan bahwa narasumber yang dituju mengetahui bahwa pengetahuan jurnalisme bencana dirasa penting bagi jurnalis saat peliputan bencana, karena jurnalis harus mampu menentukan *angle* liputan yang mengandung *news value*. Selain itu, informan menyatakan bahwa penting untuk mengetahui apakah lokasi tersebut aman untuk melakukan peliputan, dan mengetahui tanda atau gejala bencana susulan yang akan terjadi. Sebagian jurnalis menurut narasumber Sukmono belum memahami P3SPS secara keseluruhan dalam peliputan bencana. Sebagian narasumber, tidak bisa memberikan pemaparan secara detail mengenai hal-hal yang mengatur pelaksanaan peliputan bencana, namun mereka hanya menjelaskan menggunakan hasil pengalaman masing-masing.

Lowrey et.al. (2007) menyusun penelitian yang berjudul *Effective Media Communication of Disasters: Pressing Problem and Recommendations* (Komunikasi Media yang Efektif tentang Bencana: Menekan Masalah dan Rekomendasi), yang bertujuan untuk mengetahui apakah benar adanya bahwa jurnalis tidak siap untuk meliput berbagai jenis bencana alam karena kurangnya keahlian yang memadai dan pelatihan bagi

jurnalis. Metode yang digunakan membantu mengidentifikasi masalah yang paling mendesak mengenai tanggapan media untuk risiko yang terkait dengan kesehatan, seperti terorisme dan bencana alam berskala besar. Sebanyak 26 penasihat, termasuk para pemimpin media yang mewakili wartawan, berpartisipasi dalam mengatur wawancara dan diminta untuk mengidentifikasi dan meninjau sumber daya pendidikan bioterorisme yang disediakan untuk wartawan.

Hasil temuan dalam penelitian Lowrey (2007) menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam koordinasi antara perusahaan media dan wartawan. Selain itu, ada pula perbedaan dalam persepsi perusahaan media dan jurnalis terhadap peran satu sama lain selama situasi darurat. Penelitian ini juga mendapatkan hasil nyata bahwa perusahaan media dan jurnalis memainkan peran penting dalam membentuk respons publik terhadap bencana. Namun, penelitian formatif ini menunjukkan bahwa perspektif dan proses organisasi sering membatasi komunikasi yang efektif antara kelompok-kelompok.

UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Adhika Pertiwi	Filosa Gita Sukmono dan Fajar Junaedi	Andini Nur Nabila
Judul	Pemahaman Jurnalis Mengenai Konsep Jurnalisme Bencana (Wawancara Lima Jurnalis dari Media Cetak, Media Televisi, dan Media <i>Online</i>)	Menggagas Jurnalisme Optimis dalam Pemberitaan tentang Bencana	Pemahaman Media Terhadap Standar Keselamatan Jurnalis Saat Peliputan Bencana Alam: Studi Kasus Terhadap Pemahaman Media INews
Tujuan Penelitian	1. Mengetahui pemahaman jurnalis mengenai konsep jurnalisme bencana, dilihat dari proses saat melakukan peliputan bencana, dan pemahaman mengenai konsep	1. Mengetahui pentingnya jurnalisme sensitif bencana dalam ruang redaksi media massa.	1. Mengetahui pemahaman media INews mengenai standar keselamatan bagi jurnalis dalam persiapan ataupun saat melakukan

	peliputan bencana, dan di tiap fase peliputan bencana		peliputan bencana alam.
Teori dan Konsep	1. Teori Pembuktian (<i>Verification Theory</i>) 2. Teori Kognitif (<i>Cognitive Theory</i>)	Konsep Jurnalisme Sensitif Bencana	Konsep Manajemen Media dalam Mengatur Keselamatan Diri Jurnalis
Metode Penelitian	Studi kasus - kualitatif deskriptif dan menggunakan paradigma postpositivisme	Studi kasus – analisis antarkasus (<i>crosssite analysis</i>) kualitatif deskriptif menggunakan paradigma positivisme	Studi kasus - kualitatif deskriptif
Pengumpulan Data	Wawancara, Observasi, Studi Dokumen	Wawancara mendalam	Wawancara, Observasi, Studi Dokumen
Hasil Penelitian	1. Menjelaskan bahwa jurnalis sebagian sudah memahami	1. Mengetahui bahwa pelatihan tentang keselamatan bencana oleh perusahaan	1. Media INews belum memiliki standar keselamatan untuk

	<p>mengenai jurnalisme bencana namun tidak secara menyeluruh.</p> <p>2. Jurnalis memahami prinsip akurasi, memberikan porsi untuk penampungan suara korban, mengangkat <i>human elements</i>, dan sisi lain bencana.</p> <p>Namun, hanya saja jurnalis belum memahami prinsip peliputan yang menekankan perspektif kemanusiaan dalam peliputan bencana.</p>	<p>media kepada jurnalis masih kurang</p> <p>2. Mengetahui bahwa media massa di Indonesia tidak siap menghadapi bencana (prosedur keamanan dan peralatan pendukung keselamatan).</p>	<p>para jurnalis dalam meliputan bencana alam.</p> <p>2. Media INews belum mengadakan pelatihan secara periodik kepada para jurnalis dalam persiapan peliputan saat bencana alam.</p> <p>3. Media INews belum menyiapkan peralatan yang mendukung untuk para jurnalis yang bertugas di lapangan saat peliputan bencana alam.</p>
--	---	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai jurnalisme bencana, konsep jurnalisme bencana yang ada, kajian mengenai hal ini masih sangat minim dan terbatas, karena kebanyakan penelitian memusatkan jurnalis sebagai subjeknya, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan media sebagai subjeknya. Hal ini membuat konsep jurnalisme bencana sebagai konsep yang belum matang dalam segi teoritis.

Namun, menurut Nazaruddin (2007 p. 167), jurnalisme bencana saat ini sudah mulai dikaji semenjak kejadian tsunami di Aceh pada tahun 2004. Maraknya pemberitaan mengenai tsunami Aceh yang terjadi memunculkan pembentukan jurnalisme bencana menurut jurnalis. Nazaruddin menyatakan bahwa media masih terfokus untuk mengeksploitasi kejadian bencana alam tersebut demi kepentingan bisnis semata. Menurutnya, pada tahun 2007 lalu belum terdapat kajian yang lengkap dan sistematis tentang jurnalisme bencana di Indonesia. Media hanya memberitakan pemberitaan traumatik dan dramatis yang berisikan tangis, sedih, dan duka nestapa yang terjadi. Demi mendapatkan kedudukan utama, media massa cenderung mengeksploitasi kejadian bencana alam dan menyebabkan akurasi yang minim pada berita yang disampaikan (2007, p. 170).

Nazaruddin (2007, p. 172) mengutarakan bahwa media dalam jurnalisme bencana tidak memiliki kesepakatan kolektif mengenai praktiknya dalam melakukan jurnalisme bencana. Media massa di Indonesia belum memiliki panduan dalam memberitakan kebencanaan. Keadaan ini

menjadi peluang besar bagi peneliti, karena melihat tidak adanya konsep dan kesepakatan yang terbentuk, padahal Indonesia adalah negeri yang rawan dan berpotensi banyak kejadian bencana alam. Menurut Nazaruddin, seharusnya ada panduan untuk jurnalisme bencana seperti halnya panduan di lokasi konflik dan perang.

2.2 TEORI ATAU KONSEP YANG DIGUNAKAN

2.2.1 Media Massa

Menurut Bernard C. Cohen (dalam Fachruddin, 2017, p. 48) Jurnalistik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bernard menyebutkan berbagai peran jurnalistik, yakni:

1. **Pelapor (*informer*):** Jurnalis bertindak sebagai mata dan telinga khalayak, jurnalis berperan dalam melaporkan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara netral dan tanpa prasangka.
2. **Penafsir (*interpreter*):** Peristiwa yang terjadi selalu memerlukan penafsiran atau arti, sehingga sebagai seorang jurnalis, mampu berperan dalam memperjelas arti atau makna, dengan melakukan analisis berita dalam berita reportase atau komentar berita dalam tajuk rencana.
3. **Wakil dari publik (*representative of the public*):** Jurnalistik harus dipandang sebagai wakil dari publik. Maka dari itu, berita yang menjadi produk jurnalistik harus ditulis sebagai cerminan suara rakyat.

4. **Peran jaga (*watchdog*):** Jurnalistik juga berperan sebagai “anjing penjaga” yang mengkritisi kebijakan/tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Jurnalistik dituntut untuk membela kepentingan publik, dan masyarakat tertindas.

5. **Pembuat kebijaksanaan dan advokasi:** Pembelaan terhadap kepentingan masyarakat merupakan “panggilan” dalam jurnalistik. maka dari itu seorang jurnalis harus berlatih mengasah ketajaman analisis dan kepekaan nurani untuk dapat melihat permasalahan sosial masyarakat yang terjadi. Sehingga jurnalistik menjadi berbobot. Prinsip kebenaran dan keadilan merupakan dua prinsip utama yang wajib kamu pegang sebagai seorang jurnalis.

Pengertian Berita Televisi menurut para ahli (dalam Fachruddin, 2017, p. 49) menurut Soewardi Idris, berita harus benar dan tepat, berita harus menarik, harus baru, dan harus mengandung suatu penjelasan. Turner Cathledge dari New York Times mengatakan “Berita adalah segala sesuatu yang tidak anda ketahui pada hari kemarin” Mitchel V. C. menjabarkan bahwa berita adalah berupa laporan yang tepat waktu dan memberikan fakta atau opini yang memiliki daya tarik dan penting untuk masyarakat luas.

Setiap berita harus didasari oleh fakta, adil, dan tidak memihak. Apabila berita atau peristiwa yang baru, unik, penting, dan menarik memiliki nilai berita. Kesimpulannya, berita televisi adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat dalam tulisan atau narasi, *audio visual*, gambar foto, peta, grafis, baik direkam, atau *live* yang aktual, menarik, bermanfaat, dan dipublikasikan melalui media massa periodik (Fachruddin, 2017 p.50).

Menurut Zettl (2015, p. 4) ada tiga tahap dalam memproduksi sebuah tayangan televisi. Pertama, pada tahap pra-produksi segala keperluan awal sebelum terjun ke lapangan harus sudah tersusun, dilengkapi dengan kebutuhan untuk produksi seperti lokasi, kru yang bertugas dan peralatan liputan. Tahap produksi menurut Zettl (2015, p. 372) adalah tahap peliputan dengan formasi lengkap yang berisikan kru dan perlengkapan alat yang akan dioperasikan. Tahap ketiga, pasca produksi adalah ranah untuk penyuntingan baik video maupun audio.

Pada tahap pra-produksi, perencanaan dan detail petunjuk pelaksanaan produksi seperti konten dan *audio visual* harus dibuat terlebih dahulu. Berbagai perencanaan seperti pengambilan gambar, *story board*, dibuat agar menjadi panduan dalam mengatur *shot*.

Pada program berita, diperlukan adanya riset, daftar harapan atau *wishlist* (urutan *visual/shootlist* sebagai bentuk sederhana dari *story board*). Ide peliputan turut dibahas dalam sebuah rapat redaksi, yang

terdiri dari produser program, koordinator liputan, koordinator daerah, koordinator juru kamera, penyiar, dan produser eksekutif dalam membicarakan setiap ide liputan dan menimbanginya dari berbagai hal. Pembahasan rapat termasuk pada fokus informasi yang harus diperoleh, gambar yang harus direkam, dan narasumber yang harus diwawancarai (Fachruddin, 2017, p. 18)

Fachuddin menjelaskan pada tahap produksi, ide atau rencana yang dibuat dengan wishlist setelah disepakati redaksi bisa jadi berbeda dengan kondisi dan keadaan di lapangan. Redaksi dan jurnalis televisi akan melakukan komunikasi, untuk memantau perkembangan setiap isu penting dan menarik yang sedang dibahas. Realitanya, akan ada narasumber tidak sesuai dengan yang dibayangkan, perkembangan di lapangan yang jauh lebih menarik, dan hambatan eksternal (alami) yang tak terduga. Maka seorang jurnalis, harus memiliki alternatif rencana dalam melakukan peliputan, sehingga proses produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat dari awal. Tidak lupa, jurnalis juga turut memastikan ketersediaan materi berita agar tidak kehilangan momentum apalagi dengan kompetitor kuat (2017, p. 19)

Tahap pasca produksi televisi menjelang berita on air, rapat redaksi (budgeting) menyusun komposisi berita berdasarkan kebijakan redaksi dalam sebuah “rundown program berita”. Akan ada rapat final untuk mengevaluasi urgensi berita dalam rundown

(akan ditayangkan), untuk mengetahui apakah sesuai dengan rapat redaksi di awal atau tidak. Serta mensinkronkannya dengan situasi terakhir. Editing naskah oleh produser dan editing gambar oleh editor diproses bersamaan. Dalam tahap ini, segala aspek teknis naskah dan gambar yang akan hadir kepada khalayak diperhitungkan.

Gambar 2.1 Alur Produksi Program Berita

Working Schedule Program Berita

NO	TAHAP	RINCIAN PROSES KEGIATAN	TARGET PER HARI																			
			MINGGU 1						MINGGU 2													
			1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6							
1	PRA PRODUKSI	Menemukan Ide/gagasan (Isu hangat, momentum, agenda event, fenomena, follow up)	x																			
2		Topik	x																			
3		Angle/Perspektif	x																			
4		Rapat budgeting/Rapat persiapan	x	x																		
5		Rencana peliputan/Wishlist/ Membuat daftar pertanyaan	x	x																		
6		Memanfaatkan jaringan/narasumber	x	x																		
7		Pengecekan peralatan/perlengkapan	x	x	x																	
8		Koordinasi dengan KORLIP & KORDA	x	x	x																	
9		Peliputan	x	x	x																	
10	PRODUKSI	Koreksi audio/visual	x	x	x																	
11		Seleksi materi hasil liputan/ Rapat redaksi	x	x	x																	
12		Struktur Penulisan/ Format Penyajian	x	x	x																	
13	PASCA PRODUKSI	Capture	x	x	x																	
14		Logging	x	x	x																	
15		Editing (off line/on line)	x	x	x																	
16		Pengisian Suara (dubbing/manipulating)	x	x	x																	
17		Sub Title/title	x	x	x																	
18		Ilustrasi Musik/ Efek	x	x	x																	
19		Mixing	x	x	x																	
20		Preview	x	x	x																	
21		ON AIR	On air Program	x	x	x																
22		Evaluasi Program		x	x	x																

Sumber: Fachruddin, Andi (2017, p. 19)

2.2.2 Konsep Manajemen Media

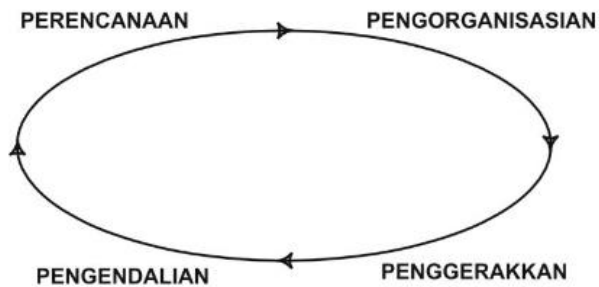
Kung (2008, p. 4) menyatakan bahwa manajemen media lebih spesifik membahas tentang strategi perusahaan dalam mengelola bisnis media, termasuk fungsi manajemen, kepemimpinan media,

produksi konten media, manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi media, dan lain-lain.

Iriantara (2016, p. 9) menyatakan secara garis besar bahwa dalam sebuah organisasi, lembaga dan perusahaan wajib memiliki fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian atau yang lebih dikenal dengan *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC). Perencanaan dibentuk dalam merumuskan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian akan dikukuhkan dalam pembagian tugas dan sumber daya manusia. Penggerakkan merupakan pengerahan sumber daya manusia dan pengendalian dilakukan dalam mengawasi dan mengevaluasi.



Gambar 2.2 Fungsi Manajemen



Sumber: Modul Iriantara hal. 9

Ramli dan Sri Yuniati (2014, p. 1.7) mengartikan secara tradisional manajemen sering mengarah pada aktivitas organisasi yang melibatkan beberapa fungsi manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian sumber daya), *Staffing* (Pengadaan Staf), *Direction* (Pengarahan), *Control* (Pengawasan), *Innovation* (Pembaharuan).

1. *Planning* (Perencanaan)

Manajemen selalu dimulai dengan perencanaan yang baik. Apabila perencanaan tidak baik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Perencanaan dibentuk untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang sebuah organisasi. Harus melihat dari berbagai aspek pendukung seperti sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Semua harus diperhitungkan dengan baik.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Setelah sebuah rencana terbentuk, maka harus segera diwujudkan. Seseorang yang memiliki kedudukan harus mempersiapkan seluruh unsur yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana tersebut. Ia juga harus menentukan peranan penting setiap orang dalam setiap bidang agar mampu meraih tujuan bersama.

3. *Staffing* (Pengadaan Staf)

Dalam pengadaan staf, posisi dalam menentukan tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan perubahan dan perencanaan menentukan seseorang dengan pekerjaan yang terkait.

4. *Direction* (Pengarahan)

Ketika sebuah organisasi sudah memastikan untuk memulai aktivitas, seseorang yang berwenang dalam memerintah bawahan harus memberitahu apa yang harus dilakukan. Harus mempersiapkan pengarahan dari hari ke hari sampai mengetahui hasil yang diharapkan organisasi.

5. *Control* (Pengawasan)

Dalam organisasi, harus ada pengawasan agar semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

6. *Innovation* (Pembaharuan)

Fungsi manajemen tidak lengkap bila suatu kegiatan hanya dilakukan secara rutin. Hal ini akan membuat organisasinya tetap statis, walaupun keadaan baik-baik saja. Maka dari itu, adanya fungsi inovasi ini adalah untuk dapat mengembangkan ide baru.

Pareno menyatakan dalam redaksi, manajemen media menerapkan fungsi-fungsi manajemen melalui tindakan dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengawasan dalam mengelola materi pemberitaan yang mencakup proses peliputan, proses penulisan, sampai proses penyuntingan (2003, p. 45).

2.2.3 Regulasi Media dan Bencana

Televisi menyiarkan berita yang bukan hanya dari kejadian hari kemarin namun juga berita yang terjadi secara langsung (Junaedi, 2013, p. 3). Musibah ataupun bencana alam bisa disebut sebagai berita karena melibatkan aspek empati dari khalayak. Junaedi menyatakan bahwa dalam penugasan reporter yang meliput berita ke lapangan, akan melihat berbagai macam peristiwa. Namun, tidak semua peristiwa dapat dijadikan berita. Saat berita dikirim oleh reporter kepada redaktur, belum tentu berita tersebut akan disiarkan oleh redaktur. Redaktur dalam hal ini melakukan pemilihan terhadap berita yang dikirim oleh reporter (2013, p. 6)

Hollifield, et. al. (2016, p. 291) menjelaskan bahwa regulasi sebuah institusi media penyiaran sudah ditentukan oleh *The Federal Communication Commision* (FCC) dalam mengatur siaran komunikasi, termasuk penugasan lisensi siaran untuk radio dan televisi, pembentukan aturan kepemilikan, hukuman untuk konten yang tidak layak, dan aturan komunikasi politik pada tayangan.

Tiga regulasi penting yang diusung, yakni kepemilikan, aturan ketidak senonohan kepemilikan, dan komunikasi politik. FCC menetapkan batasan pada jumlah siaran yang dimiliki, baik perusahaan maupun individu. FCC meninjau aturan kepemilikan setiap institusi untuk menentukan apakah aturan tersebut berada di area publik atau aturan yang tidak berkepentingan di ranah publik (2016, p. 292).

Dalam Undang-Undang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI juga telah menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Pada bagian peliputan bencana, pasal 49 tahun 2012 menyatakan program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah.

Pada pasal 50 tahun 2012, terdapat beberapa larangan dalam meliput bencana, diantaranya:

a. Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.

b. Menampilkan gambar dan/atau suara saat-saat menjelang kematian.

c. Mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber.

d. Menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up; dan/atau.

e. Menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02 tahun 2007 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (KPI, 2012) menimbang bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi bersama oleh lembaga penyiaran agar dalam memanfaatkan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya.

Selain itu, KPI juga menimbang bahwa dengan munculnya stasiun-stasiun televisi dan radio baru di seluruh pelosok Indonesia, harus disusun standar baku yang mampu mendorong

lembaga penyiaran untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. oleh karena itu, Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

Pada pasal 51 tahun 2012, program siaran jurnalistik tentang bencana wajib menampilkan narasumber yang kompeten dan terpercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah.

Regulasi tersebut saling berkaitan dan diwajibkan untuk dilaksanakan oleh industri media di Indonesia. Fungsi normatif media ditentukan oleh profesionalisme media, sedangkan untuk mencari tahu profesionalisme media dapat diketahui melalui sejauh mana media menaati peraturan maupun kode etik yang ditetapkan di Indonesia.

Namun, menurut Arif (2010), media masih kurang dalam mendidik wartawannya, dan dalam memberikan wawasan luas mengenai kebencanaan. Setiap regulasi yang ada belum menyentuh hal kebencanaan, untuk meningkatkan profesionalitas setiap perusahaan media maupun jurnalis itu sendiri.

Menurut Soebagyo (2014, p. 3) proses menganalisis sebuah kebijakan ialah menciptakan ranah pengetahuan dari dalam proses kebijakan itu sendiri. Ciri-ciri dalam menganalisis kebijakan yakni kebijakan yang merupakan kegiatan kognitif menyangkut pembelajaran dan pemikiran. Kebijakan publik ini nantinya akan menghasilkan kegiatan kolektif yang teroganisasi mengenai masalah yang ada. Terapan ini termasuk yang bersifat reflektif, kreatif, imajinatif, dan eksploratif. Kebijakan ini dibuat secara menyeluruh bukan hanya untuk pribadi karena masalah tersebut melibatkan banyak orang.

Menurut Nazzarudin (2007), pemberitaan mengenai bencana ini menciptakan *genre* baru dalam dunia jurnalistik yang dikenal dengan jurnalisme bencana. Setelah kejadian tsunami Aceh tahun 2004, memang sudah mulai bermunculan pemberitaan mengenai bencana alam yang terjadi di Indonesia. Wartawan semakin berlomba-lomba dalam mencari berita mengenai bencana alam. Hal inilah yang merujuk pada tidak adanya pemahaman jurnalis terhadap bahaya yang ditimbulkan ketika peliputan bencana. Konsep jurnalisme bencana sebenarnya merupakan cerminan jurnalisme yang bertumpu pada rasa kemanusiaan (Nazaruddin, 2007, p. 167).

Dalam contoh kasus yang dialami Lalita (2016), ia mengakui bahwa pendidikan jurnalisme bencana belum banyak dilakukan oleh media massa di Indonesia, yang menjadikan jurnalis saat peliputan

bencana harus belajar secara otodidak, karena aspek utama dalam peliputan bencana ialah keselamatan.

Arif (2010, p. 77) menyatakan bahwa jurnalisme bencana yang dibingkai oleh media masih lebih banyak menyajikan air mata dan darah. Pembingkai berita didramatisasi dengan penderitaan korban, terutama ditunjukkan dengan penyajian foto dan video para korban. Lampito (dalam Sukmono, 2018, p. 112) mengenai peliputan gempa Yogya pada tahun 2006 dan erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, Lampito menjadi jurnalis sekaligus korban. Ia menempati dua posisi, yakni sebagai jurnalis yang secara langsung terdampak bencana, dan jurnalis yang tidak menjadi korban langsung tetapi terdampak pada keluarganya. Menurut pengalamannya, pemahaman jurnalis mengenai bencana adalah yang utama. Menurutnya, tidak ada berita seharga nyawa. Lampito mengakui bahwa pelatihan keselamatan bencana yang diberikan oleh perusahaan media masih kurang.

Dhani (2014), menyatakan secara etis bahwa Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah memiliki peraturan jelas tentang bagaimana seharusnya jurnalis meliput kasus-kasus seperti kecelakaan dan kebencanaan. Kode Etik AJI menjelaskan bahwa dalam melakukan reportase, jurnalis harus menggunakan cara etis serta melakukan profesionalisme dalam

memperoleh berita, gambar, dan dokumen. PWI menyatakan hal serupa dengan penjelasan khusus.

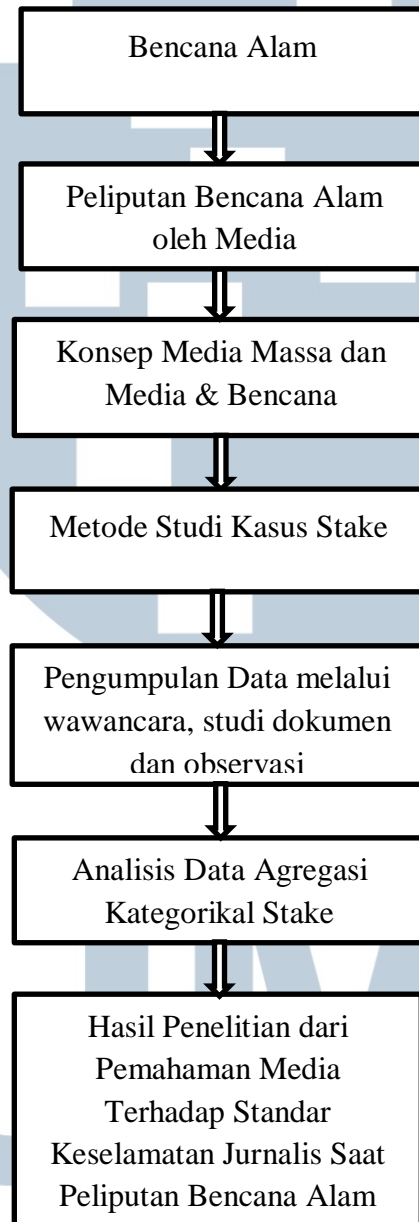
Namun, menurut Dhani (2014) ketika hal ini dilanggar, tidak pernah ada sanksi dari Dewan Pers. Jurnalis belum dibekali pemahaman yang cukup atau bahkan pengetahuan sederhana mengenai etika jurnalistik bagi reporter pemula untuk bisa bekerja secara profesional. Dhani beranggapan bahwa tidak semua jurnalis pernah diajari bagaimana menjadi jurnalis yang benar oleh redaktur mereka. Pun, sebagai jurnalis ia tidak bisa menyalahkan redaktur pada organisasi tersebut karena tidak bisa bekerja dengan baik dan benar, karena jurnalis yang diberikan tanggung jawab ditekan untuk mencari berita demi dapat menaikkan rating.

Dalam konsep manajemen media dan bencana ada beberapa fase dalam melakukan aktivitas jurnalistik. Aktivitas tersebut meliputi jurnalistik pada fase prabencana, bencana, dan pascabencana. Ketiga fase tersebut seharusnya dilakukan media mulai dari kampanye pencegahan bencana, peliputan data yang akurat di lapangan saat terjadi bencana, dan pengawasan terhadap kegiatan pascabencana.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.3 Alur Penelitian

Bagan 2.1 Alur Penelitian



Peneliti menentukan rumusan masalah melihat dari kasus yang banyak terjadi dikalangan jurnalistik. Setelah menentukan rumusan masalah yang ingin diteliti, peneliti mencari beberapa sumber penelitian terdahulu

yang bersangkutan dengan penelitian ini, selanjutnya peneliti mencari teori atau konsep yang mendukung penelitian ini. Setelah itu, peneliti menentukan subjek yang dapat membantu penelitian ini. Setelah memastikan subjek, kemudian peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sampai akhirnya membuat pertemuan untuk melakukan wawancara dengan ke-empat narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Setelah wawancara selesai, *audio record* diverbatim dan dijadikan transkrip wawancara. Setelah itu, menurut studi kasus Stake, peneliti akhirnya membuat beberapa kategori untuk menarik kesimpulan.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA